



2022

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintahan

LKjIP



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan karena kekuasaan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) Dinas Sosial Kabupaten Gowa ini dengan baik dan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Penyusunan laporan ini merupakan amanat Perpres No. 29 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah. Pada penilaian sistem akuntabilitas instansi kinerja pemerintah salah satu poin penting adalah Laporan kinerja yang menggambarkan capaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2022 dapat direalisasikan.



Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun ke belakang, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan kajian dalam melaksanakan program kegiatan yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sungguminasa,

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa



Drs. H. Firdaus, S.Ag, M.Si

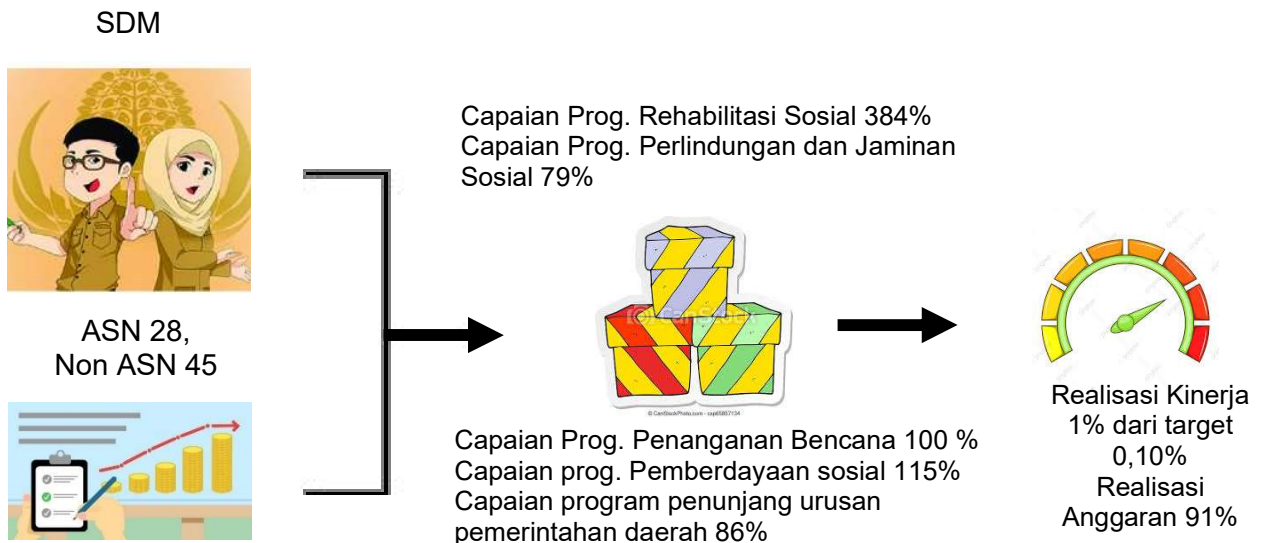
i

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19710628 199303 1 012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2022 dalam mewujudkan tujuan sasaran strategis **“Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial PMKS”** termasuk pada kategori yang sangat memuaskan karena capainnya yang tinggi dapat dilihat pada skema berikut ini :



Serapan Anggaran
91%

Capaian Program Rehabilitasi Sosial 384% dengan realisasi anggaran Rp 261,750,280.00 , capaian program perlindungan dan jaminan sosial sebesar 79% dengan realisasi anggaran Rp 2,183,514,000.00, capaian program penanganan bencana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 81,771,450.00, capaian program pemberdayaan sosial 115% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 195,767,870.00 dan program penunjang urusan pemerintahan daerah capaian 86% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3,494,373,268.00 . Total realisasi anggaran sebesar Rp 6,355,957,868.00 .

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
C. ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL	7
D. STRATEGI ORGANISASI	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. TUJUAN DAN SASARAN	10
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	11
C. PERJANJIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
B. REALISASI ANGGARAN	29
BAB IV PENUTUP	30
A. KESIMPULAN KINERJA 2022	30
B. PERMASALAHAN ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA	30
C. SOLUSI PEMECAHAN MASALAH	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan sebuah muara tuntutan dari pelaksanaan *Good Governance*. Tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu *output* nyata tata Kelola pemerintahan terbaik ini dengan terbentuknya dokumen Laporan Kinerja yang akuntabel.

Laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan daerah disusun dengan memperhatikan pohon kinerja dari Dinas Sosial dimana terdapat empat program untuk mewujudkan 1 (satu) tujuan dan sasaran SKPD. Penyusunan laporan kinerja ini sejalan dengan visi Kabupaten Gowa **“Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”**. Pembuatan laporan kinerja ini menekankan pada tata kelola pemerintahan terbaik yang tentu saja menunjang kinerja utama.

Dinas Sosial mempunyai tugas utama melaksanakan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Sasaran Kinerja Utama Dinas Sosial adalah **“Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS”**. Pencapaian sasaran kinerja utama tersebut tentu saja harus ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Berikut ini Pohon Kinerja Dinas Sosial yang telah disusun menjadi acuan kinerja selama tahun 2022.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada peraturan daerah kabupaten gowa nomor **88** tahun **2021** tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial terbagi dalam 4 bidang dan 1 sekretariat, termasuk didalamnya adalah kepala dinas, sekretaris. Dinas sosial, ini memiliki beberapa sdm untuk dapat menunjang tugas dan fungsinya yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang pns dan memiliki tenaga tambahan berupa 45 (empat puluh lima) orang tenaga pekerja sosial yang tersebar ke seluruh bidang.

a) Tugas Dan Fungsi

1. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;

- pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

- (1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan] pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi:
 - perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial;
 - pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial;
 - pelaksanaan administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial; dan

- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

- (1) Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh kepala bidang, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas tugas merencanakan operasionalisasi penyelenggaraan tugasnya terkait dengan pemberdayaan sosial meliputi Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan/Kejuangan sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi:
 - perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Sosial;
 - pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Sosial;
 - pelaksanaan administrasi Pemberdayaan Sosial; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang Perlindungan Sosial dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas membantu kepala Dinas Sosial dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi:
 - perumusan kebijakan teknis bidang Perlindungan Sosial;
 - pelaksanaan kebijakan teknis Perlindungan Sosial;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perlindungan Sosial. pelaksanaan administrasi Perlindungan Sosial; dan

- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

(1) Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas tugas merencanakan operasionalisasi penyelenggaraan tugasnya terkait yang meliputi pelayanan dan pendataan fakir miskin, pengelolaan bantuan fakir miskin sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi:

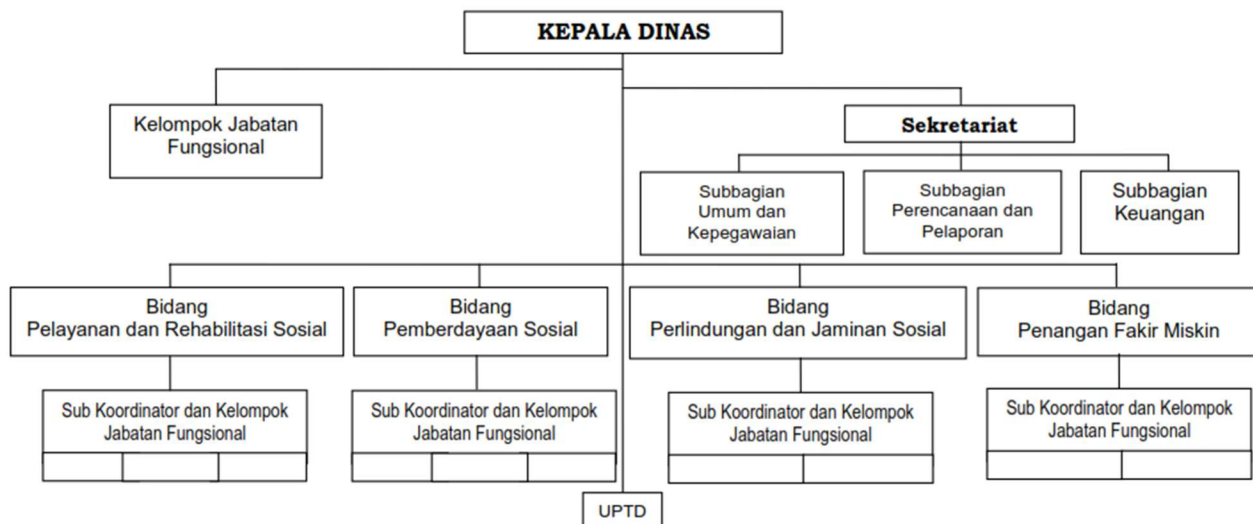
- perumusan kebijakan teknis bidang Penanganan Fakir Miskin;
- pelaksanaan kebijakan teknis Penanganan Fakir Miskin;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanganan Fakir Miskin;
- pelaksanaan administrasi Penanganan Fakir Miskin;
- dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

b) Struktur organisasi

Berdasarkan peraturan bupati nomor 88 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas sosial, berikut ini struktur organisasinya :

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 88 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



BUPATI GOWA,

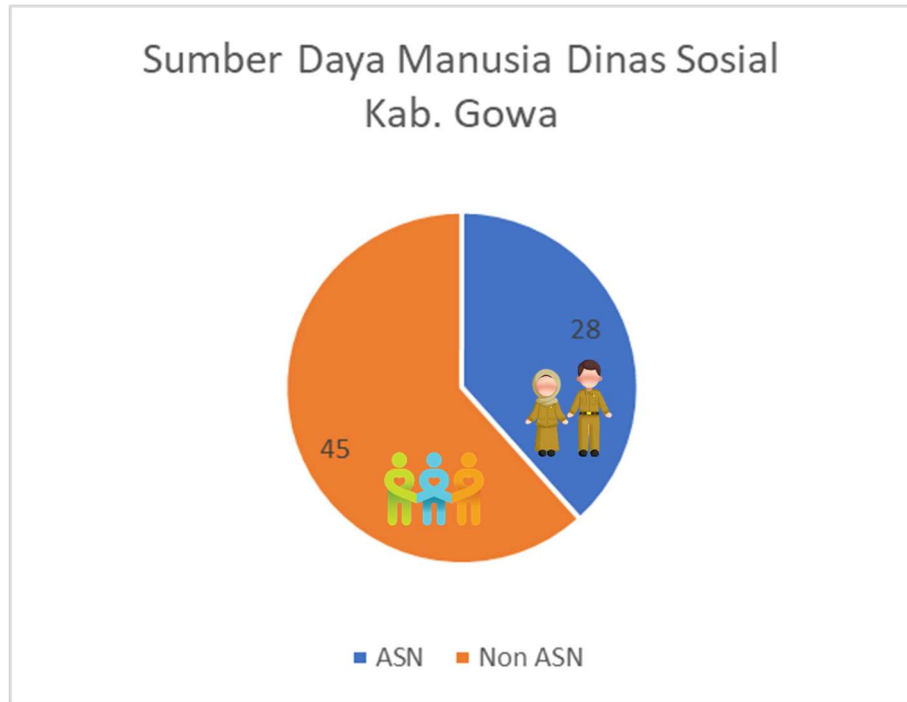
(Handwritten signature)

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

c) Sumber Daya Manusia

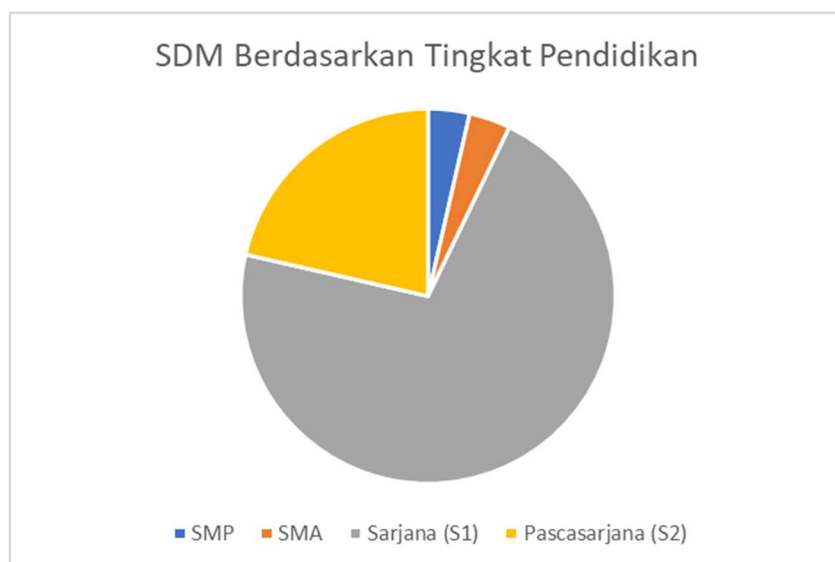
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang mewujudkan suksesnya pencapaian kinerja Dinas Sosial. Jumlah ASN per 31 Desember 2022 sebanyak dua puluh delapan (28) orang dan tenaga non ASN sebanyak empat puluh lima (45) orang.

Gambar 1.1 Grafik SDM Dinas Sosial



Berdasarkan tingkat pendidikan maka berikut ini grafik sumber daya manusia (SDM) Dinas Sosial.

Gambar 1.2 Grafik SDM Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan



C. ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

Dinas sosial sebagai salah satu pelayanan wajib dasar membuatnya mempunyai peran penting dalam mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Gowa. Menjadi salah satu organisasi perangkat daerah utama yang harus berkinerja dengan baik maka sasaran kinerja utama menjadi tugas pokok yang harus diselesaikan agar permasalahan dapat teratasi. Berikut ini beberapa isu-isu strategis Dinas Sosial yang harus dituntaskan bersama dengan OPD lainnya :

1. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan isu yang marak dibicarakan di daerah perkotaan termasuk kabupaten Gowa yang berbatasan langsung kota metropolitan Makassar. Wilayah yang luas serta batas wilayah yang “kabur” sehingga memudahkan mobilitas masyarakat baik membuat masalah ini lebih kompleks. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan dampak dari masalah kebutuhan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi. Masalah sosial anjal dan gepeng ini salah satu fokus utama Dinas Sosial yang harus ditangani karena berjalannya waktu, jumlah mereka seiring bertambah. Kehidupan anak yang tidak terpenuhi dari segi pendidikan dan kelayakan hidup membuat mereka berani turun ke jalan untuk mencari jalan keluar masalahnya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan gelandangan dan pengemis yang berusia produktif namun tidak bekerja memilih jalan singkat mengemis untuk memperoleh uang dalam waktu yang singkat. Ketidakmampuan para penyandang masalah kesejahteraan sosial ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya maka pemerintah harus hadir agar persoalan anjal dan gepeng bisa teratasi, walaupun mengentaskan permasalahan tersebut bukanlah hal mudah.
2. Kemiskinan ekstrim merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Kondisi ini pun terjadi di Kabupaten Gowa tercatat pada awal tahun 2023 ini terdapat 49.917 orang yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Permasalahan ini kemudian ditargetkan selesai pada tahun 2024, walaupun masalah kemiskinan sebenarnya tidak mungkin selesai dalam satu langkah pemberian bantuan namun harus mencari akar

permasalahannya. Oleh karena itu kemiskinan ekstrim ini menjadi salah satu isu strategis yang harus diselesaikan.

3. Stunting juga menjadi salah satu isu strategis yang dianggap sebuah permasalahan oleh Dinas Sosial. Isu stunting pun sudah menjadi isu nasional tak terkecuali Kabupaten Gowa. Anak adalah generasi penerus bangsa sehingga anak harusnya mendapatkan gizi yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pada kabupaten Gowa isu stunting ini sementara ditangani melalui program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang bersumber pada APBN. Stunting yang juga menjadi isu nasional harus ditangani pada “hulu” terlebih dahulu hingga ke “hilir” nya sehingga Dinas Sosial Kabupaten Gowa ini menganggap bahwa stunting harus diatasi pada daerah kecamatan-kecamatan yang menjadi lokus hingga ke tingkat nasional.

D. STRATEGI ORGANISASI

Mewujudkan sasaran kinerja Dinas Sosial tentu saja memerlukan strategi agar target yang ditetapkan dapat dicapai semaksimal mungkin. Strategi organisasi pun diperlukan untuk mengelola isu-isu organisasi perangkat daerah. Tersusunnya strategi organisasi ini diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah.

Pada Dinas Sosial Kab. Gowa untuk meminimalisir permasalahan yang dihadapi hal yang perlu diperkuat dengan memperkuat internal perangkat daerah terlebih dahulu. Dinas sosial memiliki sumber daya manusia yang jumlahnya cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan. Salah satu hal yang penting untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Perwujudan peningkatan kualitas tersebut dengan dilaksanakannya peningkatan kapasitas melalui sosialisasi ataupun bimtek bagi para tenaga ASN maupun non ASN dalam lingkup kerja Dinas Sosial.

Strategi organisasi selanjutnya untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial dengan pelaksanaan kinerja berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial wajib berdasarkan aplikasi pengolah data DTKS dari Kementerian Sosial sebab kualitas data yang tidak perlu diragukan. Kinerja Dinas Sosial berdasarkan data DTKS ini dilaksanakan pada beberapa program kecuali pada program dan kegiatan pemberian bantuan bagi korban bencana.

Strategi terakhir dan merupakan strategi utama dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial adalah aksi cepat tanggap yang dilaksanakan oleh tenaga kerja baik ASN maupun non ASN. Aksi cepat tanggap ini dilaksanakan untuk mewujudkan pelayanan prima pemerintahan bagi masyarakat terkhusus bagi masyarakat yang tergolong dalam pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Berikut ini penjabaran perencanaan kinerja pada tahun 2022:

A. TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan strategis merupakan perencanaan lima tahunan yang dijadikan acuan pembuatan rencana kerja tahunan. Pada bab ini menguraikan perencanaan tahunan . Dinas sosial mengambil andil pada visi kabupaten Gowa yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”** dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Berdasarkan misi di atas Dinas Sosial berkontribusi pada misi ke 2 dengan poin meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sehingga dapat ditentukan sasaran Dinas Sosial yaitu **“Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS”** dengan indikator **“Persentase Penurunan Angka PMKS”**. Berdasarkan sasaran tersebut berikut ini tabel yang menggambarkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dengan jelas.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial PMKS	Meningkatnya Taraf kesejahteraan sosial PMKS	Persentase Penurunan Angka PMKS	0,10	0,12	0,13	0,14	0,15

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial maka telah dijabarkan beberapa isu-isu strategi Dinas Sosial yang telah dipaparkan pada bab 1 sebelumnya. Mengoptimalkan penanganan isu-isu strategi tersebut maka Dinas Sosial sebagai memuat beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan informasi dan data masyarakat berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)
2. Peningkatan penjangkauan pelayanan dasar sesuai dengan SPM bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
3. Pengembangan kompetensi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial
4. Optimalisasi pemanfaatan anggaran layanan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial

C. KINERJA UTAMA

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Dinas Sosial antara lain:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja perangkat daerah pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja ASN. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Adapun indikator kinerja utama dinas sosial berdasarkan keputusan kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa nomorr 460/66/dinsos, berikut ini penetapan dan targetnya:

Tabel 2.2
Target Kinerja Indikator Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Pada Tahun ke -					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS	Persentase Penurunan Angka PMKS	0,10%	0,10%	0,12%	0,13%	0,14%	0,15%

D. Perjanjian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, Rencana Kerja (RENJA) 2022, IKU dan APBD. Dinas Sosial Kabupaten Gowa telah menetapkan PK sebagai berikut:

Gambar 1

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial 2022



The image shows a formal document titled "PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022" (Performance Agreement Year 2022). At the top center is the Garuda Pancasila logo. Below it, the title is followed by a paragraph stating the purpose: to realize an effective, transparent, and accountable government management oriented towards results. The document identifies two parties: **Pihak Pertama** (Party One) is **Drs. H. FIRDAUS, S.Ag, M.Si**, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa. **Pihak Kedua** (Party Two) is **Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH**, Bupati Gowa. The document outlines the commitments of both parties regarding performance targets, supervision, and revision. It is dated **Sungguminasa, 10 Januari 2022**. At the bottom, there are two signatures with official seals: the signature of **Dr. Adnan Purichta Ichsan YL, SH, MH** on the left and the signature of **Drs. H. Firdaus, S. Ag, M.Si** on the right, with his NIP: 19710628 199303 1 012.

Gambar 2.2


Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial 2022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN GOWA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				I	II	III	IV
Misi : Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi							
1	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS	Persentase Penurunan Angka PMKS	%				0,10


Program	Anggaran
1 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 434.912.515
2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 140.000.000
3 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 83.123.060
4 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 90.848.140
5 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 135.573.000
6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.893.663.356
Total Anggaran	Rp 4.778.120.071.00

Bupati Gowa



Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH

Sempulinas, 10 Januari 2022



Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa
Drs. H. Firdaus, S.Ag, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19710628 199303 1 012

Pada tahun 2022 untuk melihat persentase penurunan angka PMKS dengan target 0,10% dari basis jumlah penduduk miskin sebesar 456.099 jiwa. Pada anggaran tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 4.778.120.071 namun terjadi penambahan anggaran pada bulan september 2022 menjadi Rp 6.988.521.006. Penambahan anggaran ini karena kasus inflasi yang terjadi di Kabupaten Gowa sehingga pemerintah menanggarkan bantuan sosial langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak inflasi. Berdasarkan sasaran tersebut maka target kinerja keseluruhan Dinas Sosial sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target Kinerja Dinas Sosial 2022

No.	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya Taraf kesejahteraan sosial PMKS	'Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan urusan perencanaan pembangunan daerah	%	100	4,060,484,136.00
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	0,26	297,330,940.00
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang masuk dalam data terpadu	%	0,26	286,895,940.00
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Difabel , Lansia dan Anak Terlantar Yang mendapatkan Bantuan Permakanan	Orang	350	104,316,250.00
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Difabel Yang Mendapatkan Alat Bantu	Orang	50	34,750,000.00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan bimbingan	Orang	40	114,211,000.00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Jumlah Layanan rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	20	15,785,000.00

		dan Masyarakat				
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Makanan	Orang	20	14,833,690.00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Kasus Anak Yang Ditangani	Kasus	3	3,000,000.00
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang tersosialisasikan	Persen	100%	10,435,000.00
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan yang terlaksana	Kegiatan	1	10,435,000.00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh jaminan sosial	%	39	2,202,454,000.00
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang terverifikasi dan tervalidasi	%	98	2,202,454,000.00
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTSM yang terverifikasi dan tervalidasi	RTSM	40000	140,000,000.00
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	KK	4444	2,062,454,000.00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat	%	100%	83,123,060.00

			dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	Persen	100%	44,282,950.00
		Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan Makanan	Orang	150	44,282,950.00
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	Persen	43%	38,840,110.00
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA yang mendapatkan pelatihan	Orang	25	38,840,110.00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	%	100	139,933,000.00
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Berkondisi baik	%	100	139,933,000.00
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara	Makam	10	139,933,000.00

Pada tabel 2.1 di atas pada program penunjang urusan pemerintahan anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 4,060,484,136.00 yang termasuk didalamnya gaji dan penunjang-penunjang urusan Dinas Sosial. Target untuk program tersebut sebesar 100%.

Pada program rehabilitasi sosial anggaran sebesar Rp 297,330,940 dengan target 0,26 % pada indikator persentase pmks skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. **Pada program pemberdayaan sosial** dengan target anggaran sebesar Rp 205,195,870 pada indikator persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif target 20%. **Pada program program perlindungan dan jaminan sosial** dengan target 39% pada indikator Persentase PMKS yang memperoleh jaminan sosial. **Pada program penanganan bencana** dengan target 100% pada indikator persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp 83,123,060. Pada program **pengelolaan taman makam pahlawan** dengan target sebesar 100% anggaran ditetapkan sebesar Rp 139,933,000.

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Sosial ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tabel Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

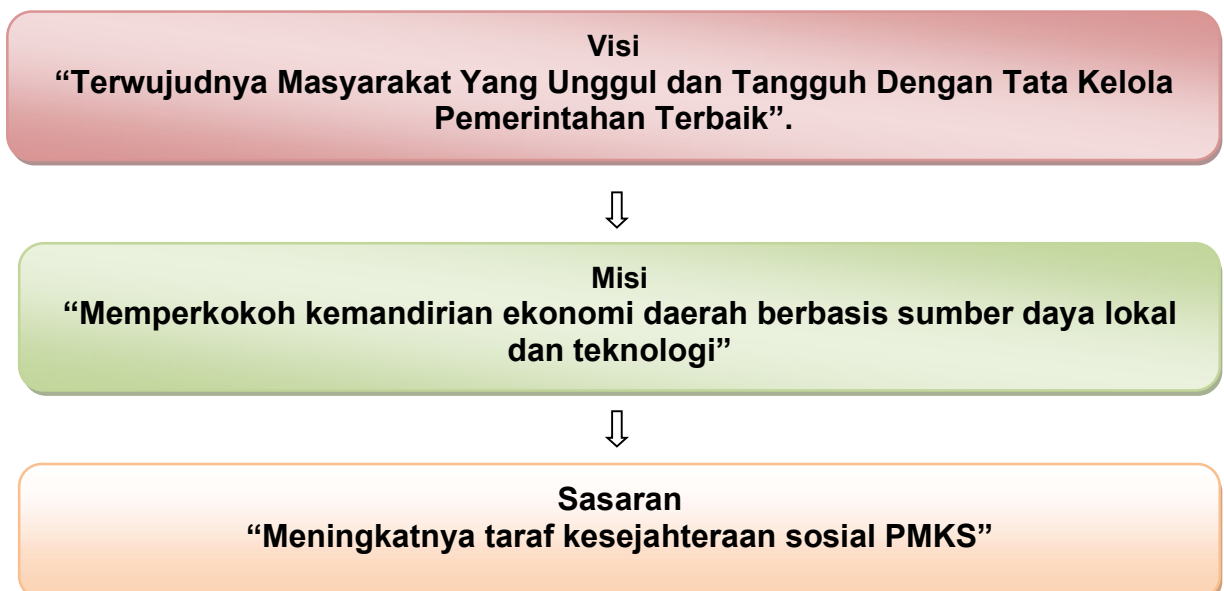
Dinas sosial merupakan salah satu urusan wajib layanan dasar yang mempunyai tugas untuk melaksanakan misi 2 Tujuan pembangunan Kabupaten Gowa pada tahun 2021-2026 pada misi 2 yaitu **“Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi”** misi ini dilaksanakan tidak lain untuk mewujudkan visi Kabupaten Gowa yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”**.

Dinas sosial yang memiliki tugas pada misi dua menjadi salah satu organisasi perangkat daerah yang harus bekerja sama dengan opd lainnya untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gowa. Pengentasan kemiskinan ini akan ditangani dengan pemberian bantuan yang bersifat stimulan bagi masyarakat miskin. Pada periode 2021-2026 ini pemerintah kabupaten gowa khususnya Dinas Sosial ini mengedepankan bantuan bersifat stimulan ini dari APBD maupun APBN. Pemberian bantuan model tersebut tidak mutlak seluruhnya, Dinas Sosial melakukan migrasi secara bertahap.

Mewujudkan kinerja Dinas Sosial harus diukur melalui ukuran yang jelas yang disebut pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Bagan 1

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial



a. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran pencapaian sasaran strategis “**Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS**” dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditentukan pada RPJMD 2021-2026

Berikut dibawah ini realisasi dan capaian “**Persentase Penurunan Angka PMKS**”

Tabel 3.1
Realisasi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS	Persentase Penurunan Angka PMKS	%	0,10	1	1000%

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persentase PMKS yang tertangani sebesar 1% jauh melampaui target yang telah ditentukan. Pada tahun 2022 total bantuan sosial berdasarkan APBN dan APBD telah diberikan bagi 4674 jiwa dengan total data PMKS yang ada sebanyak 456.099 jiwa. Realisasi ini didapatkan dari bantuan sosial BLT BBM, bantuan permakanan, bantuan alat bantu difabel serta pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan bagi pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pada penentuan target rencana strategis periode 2021-2026 target sasaran yang ditentukan oleh Dinas Sosial memang kecil hanya 0,10% persentase penurunan PMKS. Penentuan target ini karena Dinas Sosial harus mempertimbangkan kemampuan anggaran yang dimiliki sehingga dirasa belum mampu menentukan target yang tinggi. Dari basis data 456.099

Perolehan realisasi yang sangat melampaui target yang telah ditentukan ini merupakan Kerjasama yang dilakukan oleh empat bidang yang ada di Dinas Sosial. Peningkatan kinerja ini tentunya ditopang dengan *baseline data* yang setiap tahunnya melaksanakan

verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi data ini dilakukan dengan menggunakan sistem data dari Kemensos RI yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Total Data yang diverifikasi dan validasi Tahun 2022 sebanyak 39.716 data per rumah tangga miskin.

Capaian Tahun 2022 sebesar 1000% tidak lepas dari segala macam bantuan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial. Memperbaiki kinerja SKPD memang tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten Gowa yang tergolong besar sebesar 765.836 jiwa (BPS 2020) sedangkan data masyarakat rentan Kabupaten Gowa sebesar 456.099 jiwa. Hal ini berarti jumlah masyarakat miskin atau rentan di Kabupaten Gowa sebesar 60% dari total jumlah penduduk yang ada. Dinas sosial tidak mungkin melakukan kinerja dengan hanya mengandalkan APBD sedangkan jumlah PMKS sebesar 60% penduduk.

Capaian luar biasa 1000% ini karena bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada 4674 jiwa masyarakat miskin Kabupaten Gowa. Bantuan sosial ini berupa bantuan langsung tunai sebesar Rp 450.000 bagi 4400 jiwa masyarakat miskin, 213 anak dan lansia miskin berupa permakanan, 11 orang difabel berupa alat bantu dan 50 orang PMKS lainnya yang diberikan bimbingan fisik dan keterampilan lainnya.

b. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 :

Berikut ini perbandingan pencapaian sasaran Strategis Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gowa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan sasaran renstra yang berbeda. Perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja					
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS	Persentase Penurunan Angka PMKS	-	1%					1000%					

Pada tahun 2022 dimana memasuki awal tahun periode RPJMD dan Renstra yang baru maka indikator sasaran yang ditetapkan adalah “**persentase penurunan angka PMKS**” pemilihan indikator baru ini tentu saja disesuaikan dengan perubahan visi misi kabupaten Gowa. Pada periode RPJMD sebelumnya sasaran dan indikator yang ditetapkan berbeda sehingga data awal pencapaian kinerja tidak bisa dipaparkan kedalam tabel tersebut.

Pada periode ini Dinas Sosial ingin melihat sejauh mana angka PMKS menurun setelah pemberian bantuan-bantuan yang bersifat stimulasi. Pemberian bantuan bersifat stimulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi para PMKS agar mereka mampu mengembangkan “*problem solving*” nya sendiri. Hal ini tentu saja sejalan dengan visi dan misi kabupaten Gowa, masyarakat dituntut untuk mandiri

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah RENSTRA SKPD.

Hasil capaian Target Kinerja Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gowa sampai dengan Tahun 2022 diukur dengan cara melihat penurunan dan peningkatan pencapaian sasaran Strategis yang telah ditetapkan dan membandingkan pencapaian sasaran pada tahun sebelumnya. Adapun perbandingan pencapaian sasaran Strategis Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gowa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gowa

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja					
			2026	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	2	3	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS	Persentase Penurunan Angka PMKS	0,15%	1					

Capaian Tahun 2022 sebesar 1000% tidak lepas dari segala macam bantuan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial. Memperbaiki kinerja SKPD memang tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD dikarena jumlah penduduk Kabupaten Gowa yang tergolong besar sebesar 765.836 jiwa (BPS 2020) sedangkan data masyarakat rentan Kabupaten Gowa sebesar 456.099 jiwa. Hal ini berarti jumlah masyarakat miskin atau rentan di Kabupaten Gowa sebesar 60% dari total jumlah penduduk yang ada.

Pada tahun 2022 ini memasuki awal tahun periode RPJMD dan Renstra yang baru maka indikator sasaran yang ditetapkan adalah **“persentase penurunan angka PMKS”** pemilihan indikator baru ini tentu saja disesuaikan dengan perubahan visi misi kabupaten Gowa. Pemberian bantuan sosial diharapkan menjadi stimulan bagi masyarakat miskin Kabupaten Gowa untuk bisa memulai kehidupan yang mandiri sehingga beberapa kategori masyarakat miskin bisa keluar dari kategori PMKS. Bantuan sosial stimulan ini berupa bantuan langsung tunai sebesar Rp 450.000 bagi 4400 jiwa masyarakat miskin, 213 anak dan lansia miskin bantuan permakanan, 11 orang difabel mendapatkan alat bantu dan 50 orang PMKS lainnya yang diberikan bimbingan fisik dan keterampilan lainnya.

d. Realisasi kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci.

Saat ini standar nasional yang dijadikan pedoman oleh Dinas Sosial adalah Permendagri No. 18 Tahun 2020 yang membahas mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan Permensos No.9 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh Dinas Sosial Kab. Gowa memiliki kesamaan mengenai domain kerja Dinas Sosial yaitu bagi PMKS di luar panti khususnya pelayanan bagi Lansia, Disabilitas, Anak Terlantar di luar panti serta gelandangan dan pengemis.

Dapat dilihat perbandingan kinerja Dinas Sosial terhadap standar nasional yang ditetapkan tersebut pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi kinerja 2022 dengan SPM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	
			Kinerja	Target	Realisasi
			2022	2022	2022
1	2	2	4	5	6
1	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS	a. Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	95,78%	100%	95,78%
		b. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kab/kota	100%	100%	100%

Pada indikator persentase penurunan PMKS yang jauh melampaui target, didalamnya sudah masuk standar pelayanan minimal (SPM) sehingga pelayanan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis sudah terhitung. Hal yang dilaksanakan pada seluruh kegiatan persentase penurunan PMKS belum tentu masuk pada kategori SPM sehingga realisasi capaian yang di dapatkan tidak mutlak 100%.

Realisasi SPM yang diperoleh hanya sebesar 95,78% karena target yang ditentukan tergolong tinggi sedangkan pada tahun 2022 ini kualitas pelayanan pun sudah harus dinilai. Kualitas pelayanan pada SPM mendapatkan poin penilaian yang penting. Berikut ini rincian kinerja standar pelayanan minimal

Tabel 3.6

Realisasi Kinerja 2022 dengan Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis PMKS	Capaian Pelayanan dan Kualitas pada SPM
1	Lanjut Usia Terlantar	88,27%
2	Disabilitas Terlantar	98,62%
3	Anak Terlantar	91,99%
4	Gelandangan dan Pengemis	100%
5	Korban Bencana	100%
Kategori Indeks Pencapaian SPM		95,78%

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan atau Kegagalan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif/Solusi Yang Dilakukan

Pada tujuan Dinas Sosial “**Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial PMKS**” diperoleh realisasi yang sangat besar dibandingkan target yang ditetapkan. Pada saat penyusunan target, Dinas Sosial tidak menargetkan terlalu tinggi hal ini karena memperhitungkan anggaran yang ada dan pencapaian target pada periode sebelumnya. Target yang ditetapkan pada tahun awal periode Renstra ini hanya sebesar 0,10% dengan perhitungan pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak PMKS sekitar 200 orang namun ternyata pada pelaksanaan jauh melampaui target karena total masyarakat yang diberikan bantuan sebanyak 4674 jiwa.

Keberhasilan yang diperoleh ini tidak lain karena kerja keras yang dilakukan oleh dinas sosial. Pada tahap awal Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebanyak 39716 KK. Pada verifikasi dan validasi data ini Dinas Sosial telah melakukan pengelolaan aduan data.

Tahap selanjutnya setelah validasi data, Dinas Sosial kemudian memberikan bantuan bagi lanjut usia, anak terlantar dan penyandang disabilitas dengan total 274 jiwa diberikan bantuan. Bantuan yang diberikan berupa bahan makanan dan alat bantu. Kegiatan yang dilakukan

oleh Dinas Sosial berupa pemberian bantuan sosial langsung tunai dalam rangka mengatasi inflasi atau yang sering disebut bantuan BLT BBM ini mendongkar pencapaian karena sebanyak 4400 jiwa masyarakat terbantu. Pemberian BLT BBM ini merupakan pemberian bantuan berupa uang. Meningkatnya kinerja dinas sosial ini setelah adanya penambahan anggaran sebanyak Rp 2.062.454.000 pada periode perubahan anggaran.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7
Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS	Persentase Penurunan Angka PMKS	0,1%	1%	1000%	6,988,521,006	6,355,957,868	91%	1098%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja. Indikator “Persentase Penurunan Angka PMKS” dengan capaian luar biasa 1000% diperoleh dengan capaian anggaran sebesar 91% menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 9% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 1098%.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran Strategis “Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS” didukung enam (6) dan dua puluh sembilan (29) kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp 6.988.521.006** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 6.355.957.868**

Adapun program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Program Kinerja yang Menunjang Pencapaian Kinerja Dinas
Sosial Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS	Persentase Penurunan Angka PMKS	1000%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0,26	1%	384%
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang masuk dalam data terpadu	350	1%	384%
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Difabel , Lansia dan Anak Terlantar Yang mendapatkan Bantuan Permakanan	50	213	61%
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Difabel Yang Mendapatkan Alat Bantu	40	11	28%
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan bimbingan	20	40	80%
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Layanan rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	20	20	100%
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan	20	20	100%

		Makanan				
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Kasus Anak Yang Ditangani	3	3	100%
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh jaminan sosial	39	31%	79%
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang terverifikasi dan tervalidasi	98	99%	101%
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTSM yang terverifikasi dan tervalidasi	40000	39716	99%
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4444	4400	99%
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	100%	100%	100%
		Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan Makanan	150	150	100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sasaran “**Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS**” dapat dicapai melalui program pelayanan rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial dan program penanganan bencana. Ketiga program inti ini merupakan program andalan Dinas Sosial. Program ini menjadi penyumbang terbesar pada pencapaian sasaran karena melalui program tersebut pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya adalah perbaikan data awal berupa data terpadu kesejahteraan sosial sehingga pemberian bantuan sosial selanjutnya bisa tepat sasaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran perencanaan Dinas Sosial sebesar **Rp. 6.988.521.006 (Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp 6.355.957.868 (Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)**. Realisasi anggaran tersebut sekitar 91%.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja dari masing – masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :

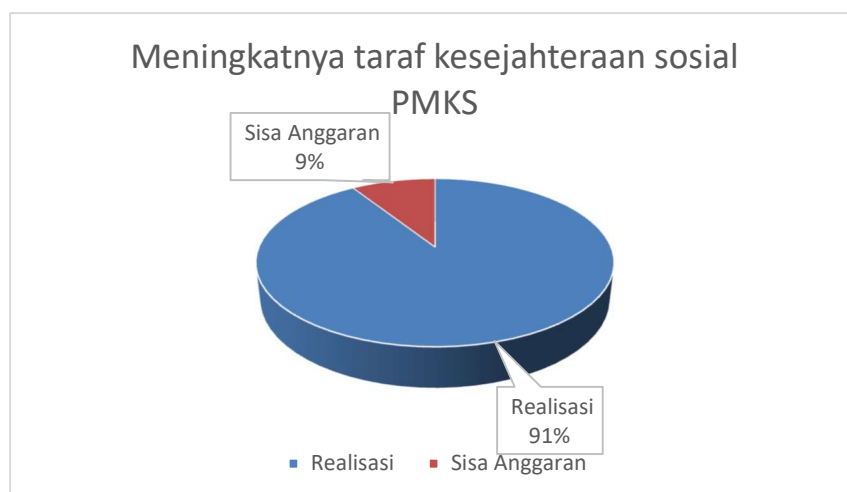
Tabel 3.9

Pagu dan Realisasi Anggaran Pada Sasaran Strategis Dinas Sosial

No.	Uraian	Jumlah
		Anggaran
	Sasaran : Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS	Rp 6.988.521.006
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 4,060,484,136
	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 205,195,870
	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 297,330,940
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 2,202,454,000
	Program Penanganan Bencana	Rp 83,123,060
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 139,933,000

Gambar 3.1

Anggaran Dinas Sosial 2022



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran strategis yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Sosial untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian strategis dengan peringkat yang diperoleh “sangat tinggi”. Tahun 2022 ini merupakan tahun pencapaian awal pada periode renstra 2021-2026 sehingga pencapaian tahun 2022 ini akan menjadi cerminan pencapaian tahun selanjutnya.

Capaian indikator kinerja sasaran “**Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PMKS**” yang mencapai 1000% tidak lain dipengaruhi oleh target yang ditentukan hanya sebesar 0,10% kemudian realisasi sebanyak 1%. Capaian ini diperoleh karena adanya penambahan anggaran besar untuk mencegah terjadinya inflasi akibat naiknya harga BBM di semua wilayah Indonesia termasuk Kab. Gowa

Target awal yang ditetapkan bahwa Dinas Sosial bisa memberikan bantuan bagi kurang lebih 300 warga miskin bertambah menjadi 4674 warga miskin yang mendapatkan bantuan. Hal ini lah yang mempengaruhi capaian Dinas Sosial menjadi sangat besar. Pencapaian besar itu pun didukung oleh realisasi anggaran sebesar 91%.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Pada tahun 2022 ini capaian yang sangat luar biasa diperoleh Dinas Sosial karena target yang ditentukan hanya 0,1%, penentuan target pada periode awal renstra ini diperoleh dengan memperhitungkan kemampuan anggaran Dinas Sosial dan kapasitas kemampuan sumber daya. Dinas Sosial selanjutnya harus mampu mempertahankan kinerja dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Verifikasi dan validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia Dinas Sosial
3. Pengalokasian anggaran secara efektif berdasarkan kinerja

1.

